



LKJIP TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERIKANAN**

Jl. Letkol Pol. Toegino-Kuala Tungkal, Tlp/Fax 0742 21023
Email : diskan.tanjabbarkab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LKJIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah dan masyarakat pada umumnya.


Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2023

Paraf	
Sekretaris	
Kasubbag	

KEPALA DINAS,

Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650913 199703 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

LKJIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung barat selama tahun 2022. Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung barat dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar belakang	7
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.3. Struktur Organisasi	8
1.4. Aspek strategis	10
1.5. Landasan Hukum	11
1.6. Maksud dan Tujuan	12
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)	14
2.3. Kebijakan dan Program	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Gambaran Umum	18
3.2. Pengukuran Kinerja	18
3.3. Prestasi IKU	20
3.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
3.5. Realisasi Anggaran	31
BAB IV. PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sekaligus merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang perikanan dan kelautan. Pembangunan perikanan dan kelautan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Arah kebijakan Dinas Perikanan tahun 202, meliputi (1) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Kemandirian Usaha Kecil Pembudidaya Ikan, (3) Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan, (4) Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta (5) Peningkatan Nilai AKIP Organisasi Perangkat daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan di lingkup Dinas Perikanan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diurai per tahun serta rencana indikasi pendanaannya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Perikanan sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Parturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah, yang menegaskan bahwa Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok *"melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan"*. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

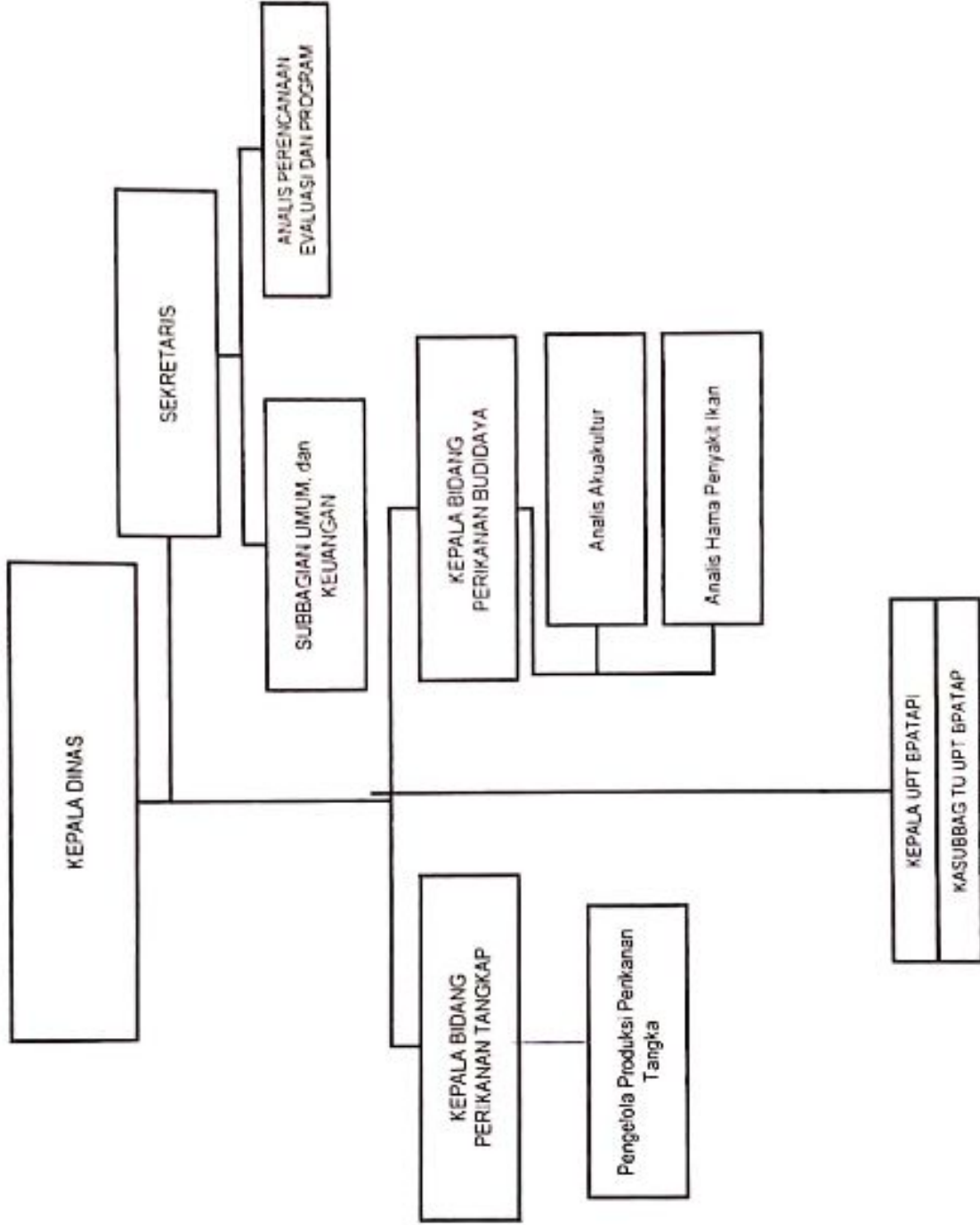
Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit Perangkat Daerah Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;

3. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
4. 1 (dua) orang Kasubbag.
5. 1 (satu) orang Kepala UPTD; dan
6. 1 (satu) Orang Kepala TU UPTD.

Setiap Bidang dibantu oleh staf/Fungsional Umum/Fungsional Tertentu sebagai unsur teknis pelaksana. Selengkapnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibantu oleh Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang (Kabid), yaitu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan 1 (satu) Kepala UPTD

Pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas, yaitu :

1. Bagian Sekretariat

Memberikan tugas pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sekretariat terdiri dari :

- a. Kasubbag Umum dan Keuangan
- b. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

2. Bidang Perikanan Budidaya

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Analis Akuakultur
- b. Analis Hama Penyakit Ikan

3. Bidang Perikanan Tangkap

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Kasi Kenelayanan
- b. Kasi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap
- c. Kasi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan

4. Kepala UPTD

UPTD Balai Perikanan Air Tawar dan Air Payau terdiri dari :

- a. Kepala TU UPTD

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai personil sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Golongan IV, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/c : 1 Orang
 - Golongan IV/b : 1 Orang
 - Golongan IV/a : 1 Orang
 - b. Golongan III, sebanyak 18 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 6 Orang
 - Golongan III/c : 6 Orang
 - Golongan III/b : 3 Orang
 - Golongan III/a : 3 Orang
 - c. Golongan II, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - Golongan II/d : 3 Orang
 - Golongan II/c : 0 Orang
 - Golongan II/b : 0 Orang
- 2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang terdiri dari :
 - Master Science – M.Sc. : 1 Orang
 - b. Sarjana (S1), sebanyak 31 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Perikanan : 14 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 5 Orang
 - Sarjana Hukum : 1 Orang
 - Sarjana Pertanian : 3 Orang
 - Sarjana Peternakan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
 - Sarjana Sosial : 1 Orang
 - c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 1 Orang

- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 19 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 2 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 13 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. PNS, sebanyak 19 Orang
 - b. Tenaga/Petugas Penunjang Kegiatan dengan Perjanjian (Kontrak) sebanyak 34 Orang

1.4. Aspek Strategis

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral bidang kelautan dan perikanan. Kemudian dilakukan analisis *SWOT* yang terdiri dari *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal SKPD, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis *SWOT* sektor perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sektor Kelautan dan Perikanan

<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah daerah menetapkan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan penunjang laju pertumbuhan ekonomi dan pendukung ketahanan pangan. 2) Potensi perikanan tangkap dan budidaya sangat besar dan masih bisa ditingkatkan. 3) Nelayan Tanjung Jabung Barat memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok. 4) Pemerintah telah memiliki aset BBI yang cukup layak. 5) Tersedianya anggaran pembangunan perikanan dari APBD Kabupaten dan provinsi serta APBN. 	<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkurangnya kewenangan kabupaten/kota dalam menangani pembangunan sektor perikanan. 2) minimnya petugas yang berkualitas dalam pengelolaan BBI sehingga fungsi tidak berjalan optimal. 3) SDM aparatur pemerintah yang menangani urusan perikanan semakin berkurang, karena tidak ada pengangkatan/penerimaan PNS.
<p>Peluang (Opportunity) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kesepakatan program ketahanan pangan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 2) Posisi geografis Tanjung Jabung Barat yang strategis (segitiga emas) sebagai pintu gerbang distribusi barang antar pulau dan di tingkat nasional. 3) Topografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjang keragaman potensi di bidang pertanian (Perikanan) dan produk olahannya. 	<p>Ancaman (Threats) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Globalisasi teknologi, informasi dan transportasi. 2) Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan perlakuan standarisasi internasional. 3) Iklim usaha kurang kondusif. 4) Luasan wilayah yang tidak didukung infrastruktur (jalan) yang memadai akan menghambat arus distribusi barang. 5) Menurunnya kualitas lingkungan. 6) Anggaran pemerintah pusat dan provinsi yang jauh berkurang dalam menunjang program ketersediaan pangan dan pengembangan potensi lokal daerah.

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun kedepan dalam matrik *SWOT* sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dari masing-masing urusan maka dapat dihasilkan strategi dan kebijakan untuk setiap urusan yaitu sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, Pengelola dan Pemasar serta usaha kecil pembudidayaan ikan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan			
No	Perpektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan tangkap yang mandiri dan berkelanjutan	Pengelolaan perikanan tangkap
		Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatkan kemandirian usaha kecil pembudidayaan ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
2	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3	Perspektif 3: Kelembagaan	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Perspektif 4: Kuangan	-	-

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan tangkap yang mandiri dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- c. Meningkatkan kemandirian usaha kecil pembudidayaan ikan,
- d. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan,
- e. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat daerah

Berdasarkan uraian diatas, maka linieritas antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut.

Tabel 1.1. Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi	Kebijakan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan							
T.1	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	S.1.1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Perikanan
T.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	S.2	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	S.1.2	Nilai Tukar usaha Perikanan (NTUP)	Meningkatkan Kesejahteraan nelayan Kecil Pengelaha dan Pemasaat serta usaha kecil pembudidayaan ikan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan tangkap yang mandiri dan berkelanjutan
				S.1.3	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kp/Thn)		Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengelahaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
							Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan

1.5. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pembangunan sektor perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD.

1.6. Maksud dan Tujuan

LKJIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKJIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LKJIP ini adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.7. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 khususnya urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 berpedoman pada Visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) serta mengacu pada misi ketiga yaitu “Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dan Misi keempat, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Dinas Perikanan telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), hal ini dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dinas Perikanan melakukan penerapan pengelolaan kinerja tersebut secara penuh, termasuk melakukan penyempurnaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik. Adapun upaya perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan riveu Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dengan memetakan peta strategi dan indikator kinerja dengan tiga Sasaran Strategis (SS) dan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan dan kelautan.
- 2) Penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, sebagai perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas dan berjenjang antara Eselon II dengan Eselon III dan Eselon IV.
- 3) Memperkuat sistem monitoring capaian kinerja dinas, termasuk didalamnya sistem pengumpulan data kinerja.
- 4) *Cascading* Sasaran Strategis dan indikator kinerja sampai level individu/staf.
- 5) Penerapan sistem penilaian kinerja individu/pegawai berbasis informasi dan Teknologi.

2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari eselon III, dan eselon II keatas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Secara terinci, IKU pembangunan kelautan dan perikanan dari sasaran strategis di atas beserta targetnya pada tahun 2022, sebagaimana pada Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	62,08 (B)	Evaluasi Tim APIP Daerah
	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	Nilai Taka Usaha Perikanan (NTUP) (B/b)	111	Nilai NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Biaya Modal (BPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib)
		Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Kg/Kapita/Tahun)	36,10	Ketersediaan Ikan/Jumlah Penduduk Dimana Ketersediaan ikan yang dimaksud didalamnya mencakup total produksi ikan (tangkap dan budidaya) ditambah impor dan stok kemudian dikurangi dengan ekspor dan produksi ikan non pangan.

2.3. Kebijakan dan Program

2.3.1. Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas taraf hidup pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan Kemandirian Usaha Kecil Pembudidaya Ikan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan.
- 4) Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 5) Peningkatan Nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan

2.3.2. Program Dinas Perikanan

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Tahun 2022, Pembangunan Perikanan dan Kelautan tersebut diimplementasikan kedalam lima program sebagai berikut:

2.3.2.1. Program Rutin

2.3.2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan Administrasi Perkantoran

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik kantor;
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya..

2.3.2.2. Program Teknis

2.3.2.2.2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap, Peningkatan Produksi Penangkapan dan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan;
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Pengembangan Kapasitas Nelayan;
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

2.3.2.2.3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya, Peningkatan Produksi Budidaya dan Benih serta Pembinaan dan Perencanaan Pengembangan Budidaya

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - Pembinaan, Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

b Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota,
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota,
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota,
- Perencanaan, Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan di Darat

2.3.2.2.4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk Kegiatan Pengawasan dan Perlindungan Kawasan Konservasi

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

a Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan Dengan Sub Kegiatan :

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2.3.2.2.5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran serta Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pembinaan dan Promosi

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

a Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

b Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan dan Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- c. Penyediaan dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Pemberiaan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pelaksana sebahagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, dan *Outcome*. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

3.2.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

3.2.2. Indikator Kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2.3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- a) Masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- b) Keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c) Hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

3.3. Prestasi IKU Tahun 2020

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat berhasil jika capaian kinerja > 100%
2. Berhasil 80-100%
3. Cukup Berhasil 60-79%
4. Tidak Berhasil <60%

Tabel 3.1. Penjelasan Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan	62,08 (B)	Semakin besar capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja SKPD semakin efektif efisien.
Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	111	Semakin besar Indeks Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan, maka Peningkatan ekonomi Pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) semakin meningkat.
Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah	36,1	Semakin besar jumlah konsumsi ikan, maka ketersediaan ikan konsumsi sudah terpenuhi oleh masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
S.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan (Kategori)	68,23	60,21 (B)	60,21 (B)	62,08 (B)	61,75 (B)	99,5
S.2.	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) (Nilai)	107,32	110	113,2	111	111	102,93
		Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	35,75	35,80	35,79	36,10	36,10	100

Tabel 3. 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

SASARAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETARANGAN
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Komponen Peningkatan Pelayanan Kantor	%	100	100	100,00	
Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Instansi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang disusun	Jenis	4	4	100,00	
Meningkatnya Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	Dokumen	2	2	100,00	
		Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RK yang disusun	Dokumen	2	2	100,00	
		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	Laporan	4	4	100,00	
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Laporan	1	1	100,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji/Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kinerja	Bulan	12	12	100,00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji Tunjangan	Orang	27	23	85,00	Terdapatnya Pengurangan ASN akibat mutasi dan pensiun
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Menerima Honor Pengabdian Kelembagaan	Orang	14	14	100,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai ASN yang disiplin	%	100	100	100,00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Staf	64	61	95,31	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam Komponen Listrik yang disediakan sesuai kebutuhan	Macam	10	10	100,00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Snack yang disediakan (kotak)	Kotak	400	190	50	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Macam barang cetakan dan penggantian yang disediakan sesuai kebutuhan	Macam	7	7	100,00	
Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Eksemplar	1.500	1.500	100,00	
Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Daerah	Penyediaan Ruang Rapat Kelembagaan dan Koordinasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat dan konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100,00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00	

		Jumlah armada perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	Unit	82	81	98,7	Terbatasnya Anggaran Dinas Perikanan Sehingga Target Kinerja belum tercapai
		Jumlah Kapal/Pemahu Nelayan yang dilaminasi Fiber	Umur	40	0	0,00	Terbatasnya Anggaran Dinas Perikanan Sehingga Target Kinerja belum tercapai
		Jumlah alat bantu penangkapan yang disediakan	Umur	60	230	416,6	
		Jumlah Penerima Manfaat Sarana Perikanan Tangkap	Kelompok	23	26	109,00	
		Jumlah Kelompok Nelayan yang Mandiri	KUB	4	4	100,00	
		Jumlah Nelayan yang mendapatkan peningkatan keterampilan, pendampingan Asuransi Nelayan dan kartu KUSUKA	Orang	430	603		
		Jumlah Nelayan yang dinolitisasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan	Orang	100	100	100,00	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.187	1.139,6	96,01	Harga Pakan ikan terus meningkat sehingga Pembudidaya mengurangi jumlah tebar benih Prasarana Budidaya yang ada belum dikelola secara optimal
		Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan fasilitas pembentukan, penguatan kelembagaan, biotek dan pelatihan CBIB /CPJB dan Pelatihan Pembuatan pakan Ikan	Kelompok, Lembaga dan Organisasi Masyarakat	16	6	37,5	Terbatasnya Anggaran Dinas Perikanan Sehingga Target Kinerja belum tercapai
		Jumlah pelekakan yang dilakukasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan	Kelompok, Lembaga dan Organisasi Masyarakat	5	5	100,00	
		Jumlah Pembudidaya ikan yang mendapatkan Biotek, Pelatihan Budidaya Ikan dan pelatihan Pembuatan pakan ikan	Orang	80	50	62,5	Terbatasnya Anggaran Dinas Perikanan Sehingga Target Kinerja belum tercapai
		Presentase Peningkatan Produktifitas Usaha Budidaya	%	2,5	2,2	88,00	
		Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Budidaya yang valid dan terbarukan yang disediakan	Dokumen	1	1	100,00	

Meningkatkan Prasana Budidaya Ikan yang memadai	Penyediaan Prasana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Prasana Perikanan Budidaya yang disediakan	Unit Paket	4	4	100,00
		- Jumlah Prasana Produksi Pakan Ikan yang disediakan	Unit Paket	4	4	100,00
		- Jumlah Unit Prasana IPT PHATAP DAN UPPAP yang dibangun, Rehabilitasi	Unit Paket	5	4	100,00
Meningkatkan Sarana Budidaya Ikan yang memadai	Perjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana perikanan budidaya yang disediakan	Jenis	8	8	100,00
		Jumlah Sarana Produksi Pakan Ikan yg disediakan	Unit Paket	1	1	100,00
		Jumlah waktu penyediaan belanja jasa kerja teknis dan petugas lapangan di IPT/UPHAP/HH Yang disediakan	Bulan	12	12	100,00
Memastikan jumlah kasus ikan yang diserang penyakit	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pemernua Manfaat Sarana Budidaya Ikan	Kelompok	10	4	17,64
		Jumlah Bahan petungkatan kualitas air, obat-obatan dan vitamin ikan yang disediakan	Jenis	3	3	100,00
		Jumlah Sarana Pengujian alat kualitas air budidaya ikan yang disediakan	Unit Paket	5	5	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Pengujian Sampel (Harna Perovakt Ikan, Nitrus pakan Ikan dan kualitas air di lingkungan budidaya ikan)	Kali	6	6	100,00
Memungkinkan Peminfaatan lahan untuk usaha budidaya ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Darat	Jumlah pemernua manfaat percontohan budidaya ikan	Kelompok	4	4	100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan (Kajian teknis Uji kelikafakan Lokasi Pengembangan Budidaya Ikan	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah Bidang lahan pembudidayaan ikan yang dapat serbikawak Hak Atas Tanah	Bidang	10	11	80,00
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Peminfaatan Sumberdaya Ikan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Peminfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Pendukung-Undangan	Lokasi	6	6	100,00
Meningkatkan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan, Air Lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam Kabupaten Kota	Jumlah pengawas dan pemantauan Sumbudaya perikanan tangkap di perairan umum	Kali	6	6	100,00
Meningkatkan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam Kabupaten Kota	Jumlah pengawas dan pemantauan usaha perikanan tangkap di perairan umum	Kali	6	6	100,00
Memungkinkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pengawasan dan Pemantauan Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum	Paket	1	0	0,00
		Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	2.271	948	51,74
						Jumlah Uji berkurang akibat pengalihan daftar Pelebar

Misi/kemampuan minat kewirausahaan akibat penyusutan kondisi pasca pandemic Covid 19						
Meningkatnya keakuratan data Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan valid dan terbarukan yang diterbitkan	Dokumen	1	1	0,00
Tersedianya Data Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang Valid dan Terbarukan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan valid dan terbarukan yang disediakan	Dokumen	1	1	100,00
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keunggulan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan penerapan penyusutan mutu hasil perikanan	Kegiatan	5	1	20,00
Meningkatnya Kemampuan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standard pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha masyarakat perikanan yang mendapatkan bimbingan pelatihan dan pendampingan usaha	orang	150	150	100,00
Meningkatnya Daya Saing Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyulaman Bahan Baku Industri Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengenalan Produk Pengolahan Hasil Perikanan	kegiatan	5	2	-40,00
Terlaksananya Pengenalan dan Inovasi Produk Hasil Perikanan Kabupaten	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan	Orang	400	400	25,00
		Jumlah UPI yang mendapatkan bantuan usaha	Kelompok	10	6	60,00
		Jumlah Pabrik Es yang difasilitasi pengembangan	Unit	0	0	0
		Jumlah Rumah Kemas yang Dikelola	Unit	1	1	100,00
		Jumlah pelaku usaha (UPI) yang mendapat fasilitas pengenalan produk Pengolahan Hasil Perikanan	Kegiatan	4	3	0,00

3.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.4.1. Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.2. di atas dapat dijelaskan bahwa Terdapat satu Indikator Kinerja dengan prestasi kerjanya sebagaimana uraian tersebut :

1) Nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan (Kategori)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Manfaat perlunya evaluasi dalam proses implementasi akuntabilitas adalah: 1. Meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik; 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi; 3. Memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan; 4. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia; 5. Sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi; dan 6. Mengarahkan pada sasaran dan memberikan informasi kinerja.

Penilaian AKIP Instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2022 Nilai AKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dievaluasi oleh Tim AKIP Daerah (Inspektorat) mendapatkan nilai dengan Kategori "B" atau sebesar 61,75 dari target sebesar 62,08 dengan persentase sebesar

99,5%. Nilai tersebut dikategorikan “Cukup (Memadai)”, artinya Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

3.4.2. Sasaran Strategis 1.2 : Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri

Berdasarkan Tabel 3.2. di atas dapat dijelaskan bahwa Terdapat dua Indikator Kinerja dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian tersebut :

1) Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)

Nilai tukar dapat digunakan untuk keperluan dua macam analisis. Penggunaan yang pertama adalah sebagai alat deskripsi (*descriptive tool*). Sebagai alat deskripsi konsep ini digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan secara statistik atau indeks mengenai kecenderungan jangka pendek dan jangka panjang tentang sejarah kelakuan harga barang-barang yang diperdagangkan. Penggunaan yang kedua yang sangat erat hubungannya dengan yang pertama, adalah sebagai alat untuk keperluan penetapan kebijakan (*tool for policy*).

Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan (nelayan dan pembudidaya) tahun 2022 bila digabungkan sebesar 138,6 atau sebesar 100% dari nilai 111, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa secara umum pelaku usaha perikanan dapat memenuhi kebutuhan subsistennya.

Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Grafik 3.1.
Perbandingan Nilai Tukar Usaha Perikanan Tahun 2020, 2021 dan 2022



2) Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)

Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun, mengenai perhitungan konsumsi ikan ini Dinas Perikanan menggunakan metode survey konsumen (*Consumer Panels*). Survey dilakukan dengan cara metode sampling. Populasi distratifikasi untuk memperoleh responden berdasarkan pendapatan, umur dan lokasi. Melalui penghitungan dengan metode ini akan diperoleh informasi mengenai jenis ikan yang dikonsumsi, tempat ikan dikonsumsi (di dalam Rumah Tangga atau di luar rumah tangga), pola preferensi konsumen dan lainnya.

Target nilai AKI yang diperkuat dengan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) tahun 2022 sebesar 36,10 Kg/Kpt/Thn. Capaian nilai AKI tahun 2022 sebesar 36,10 Kg/Kpt/Thn atau capaian sebesar 100% dari target sebesar 36,10 Kg/Kpt/Thn. Dengan mengetahui besarnya angka konsumsi ikan maka dapat diketahui besarnya kebutuhan ikan serta mengetahui jenis ikan yang dibutuhkan oleh suatu daerah/wilayah.

Untuk perhitungan konsumsi ikan Pada tahun 2022, capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah adalah sebesar 36,00 kg/kpt/thn, atau tercapai 99,7% dari target yang telah ditetapkan sebesar 36,10 Kg/Kpt/Thn. Rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 0,9% bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 35,79 Kg/Kapita/Tahun.

Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat bila dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2.
Perbandingan Angka Konsumsi Ikan Aki daerah Tahun 2020, 2021 dan 2022



Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititik beratkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (*supply*) hasil perikanan, terutama pada peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan, mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau (*accessibility*) hasil perikanan, serta mendorong peningkatan konsumsi (*consumption*) hasil perikanan.

Beberapa program yang dapat mendorong tingkat konsumsi yang sudah diinisiasi dan dilaksanakan yakni:

1. Untuk menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (*supply*) hasil perikanan, terutama pada peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan, Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan berupa penguatan armada penangkapan ikan, pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
2. Untuk menjamin kemudahan masyarakat dalam menjangkau (*accessibility*) hasil perikanan. Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan berupa pembangunan pasar ikan (dana APBN), rehabilitasi pasar tradisional dan penguatan penanganan pasca penangkapan/panen dengan pembangunan pabrik es.

3. Untuk menjamin peningkatan konsumsi (*consumption*) hasil perikanan, Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan dengan pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)

Adapun capaian kinerja (Indikator Program) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Jumlah produksi perikanan tangkap (perairan laut dan perairan umum)

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi penangkapan nelayan, produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) tahun 2022 adalah sebanyak 23.119 ton (angka sementara, belum validasi) atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 23.119 ton. Dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap ditahun 2021 sebesar 22.666 ton, mengalami kenaikan sebesar 453 ton atau naik sebesar 0,98%

Menarik untuk diketahui laju perkembangan jumlah produksi hasil tangkapan ikan (Perairan laut dan perairan umum) selama lima tahun terakhir dari 2017-2022 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.4.
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Dari Tahun 2017 – 2022



Kinerja (produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum) Dinas Perikanan pada tahun 2022 dapat memenuhi Target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah

ditetapkan pada awal tahun 2022. Walau demikian hal ini tidak lepas dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang tidak terduga, permasalahan-permasalahan tersebut adalah .

- a. Adanya revitalisasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Trawl/pukat) dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga masyarakat/nelayan belum terbiasa dalam penggunaannya.
- b. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan secara teknis nelayan dalam penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dibantu oleh pemerintah, karena rata-rata nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebahagian besar masih berusaha secara tradisional.
- c. Kurangnya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional.
- d. Telah terjadinya indikasi *over fishing* di daerah penangkapan utama, yang berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan.
- e. Adanya indikasi pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari sampah rumah tangga maupun industry.
- f. Terjadi pandemic COVID-19 di tahun 2019-2021, dimana imbas dari pandemic ini masih di rasakan dan melumpuhkan semua sector ekonomi, khususnya sector perikanan.

Solusi/pemecahan masalah yang dirasa bisa mengatasi hal tersebut adalah :

- a. Dengan adanya revitalisasi alat tangkap ini secara langsung sangat dirasakan berkurangnya jumlah penangkapan, akan tetapi kalau tidak diterapkan pada saat ini dipastikan sumberdaya ikan dan lingkungannya akan rusak, dengan adanya revitalisasi ini diharapkan sumberdaya ikan dan lingkungan dapat berkembang dan pada tahun depan dapat meningkat produksinya.
- b. Perlu adanya pelatihan khusus kepada nelayan, khususnya nahkoda, dikarenakan masih banyak nahkoda kapal penangkapan ikan yang tidak memiliki sertifikasi kenahkodaan, sehingga dalam penggunaan sarana dan prasarana masih banyak yang belum bisa memanfaatkan secara optimal.
- c. Mulai tahun 2017 telah dilakukan kredit ringan kepada nelayan, dan sampai saat ini masih dilakukan pendataan kepada nelayan, sehingga diharapkan dengan adanya pendataan ini dan masyarakat nelayan telah mendapatkan kartu KUSUKA, akses

- permodalan melalui Bank dapat dengan mudah didapatkan, sehingga nelayan tidak lagi tergantung pada "rentenir".
- d. Perlu adanya revitalisasi mangrove, dimana mangrove merupan sebagai nursery ground bagi sebahagian sumberdaya ikan, sehingga diharapkan dengan adanya revitalisasi mangrove ikan dapat berkembang kembali secara normal.
 - e. Perlu adanya pencegahan melalui sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan.

b. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan

Target produksi perikanan budidaya yang diperkuat dengan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) tahun 2022 sebesar 1.187 Ton. Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 1.140 Ton atau capaian (96,01%) dari target sebesar 1.1587 Ton. Di tahun 2022 ini sebenarnya produksi perikanan budidaya bisa lebih dari capaian yang ada, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya hasil maksimal produksi perikanan budidaya disebabkan karena cukup banyaknya lahan budidaya, khususnya tambak beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Sebahagian besar lahan tambak masyarakat masih bersifat tradisional dalam pemanfaatannya, sehingga apabila terjadi pasang tinggi air akan masuk kedalam tambak dikarenakan tanggul tambak pembuatannya masih secara manual, sehingga tanggul tidak kuat menahan air dan menyebabkan ikan/udang yang ditebar akan terbawa arus air selain itu pada tahun 2022 diperparah dengan masih adanya dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana dengan adanya pandemi ini segala aktivitas perekonomian sangat terimbas dan terjadinya pelemahan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perikanan merupakan dinas dengan typelogi A, menjadi dinas dengan typelogi C, yang artinya anggarannya pun lebih kecil daripada typelogi sebelumnya.

Jumlah produksi perikanan budidaya selama lima tahun tahun 2017 – 2022 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.4.
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Dari Tahun 2017 – 2022



Dilihat dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2017–2022 produksi perikanan budidaya perikanan mengalami trend penurunan akan tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018-2020 produksi perikanan budidaya terus mengalami tren penurunan, hal ini disebabkan karena banyaknya tambak yang berubah fungsi menjadi kebun tanaman tahunan, akan tetapi mulai tahun 2018 Dinas Perikanan telah mencoba untuk memberikan pengertian kepada masyarakat melalui pelatihan budidaya ikan, sosialisasi, pelatihan manajemen POKDAKAN dan bantuan sarana dan prasarana budidaya tambak, dengan demikian secara langsung dan bertahap produksi perikanan budidaya tambak mulai menunjukkan kenaikan, walau belum signifikan, diharapkan kedepan produksi perikanan budidaya tambak bisa meningkat sesuai yang ditargetkan.

Kinerja produksi perikanan budidaya (Tambak, Kolam, KJA/KJT/Mina Padi) Dinas Perikanan pada tahun 2022 belum dapat memenuhi Target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022. Hal ini tidak lepas dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang tidak terduga, permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Banyaknya luasan lahan budidaya tambak yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian maupun perkebunan.

- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan, dimana sebahagian besar masyarakat pembudidaya masih menggunakan cara tradisional dalam system budidaya ikan.
- c. Terhambatnya bantuan ikan dan pakan kepada masyarakat, dikarenakan kebanyakan Kelompok Pembudidaya Ikan yang ada tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang ada, yang diharuskan pada kelompok untuk berbadan hukum.
- d. Terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan.
- e. Pasar yang belum pasti, sehingga masyarakat pembudidaya ikan masih ragu dalam pembudidaya ikan dalam skala besar.
- f. Terjadi pandemi COVID-19, dimana imbas dari pandemi ini masih dirasakan dan berdampak melumpuhkan semua sektor ekonomi, khususnya sektor perikanan.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk peningkatan produksi perikanan budidaya adalah :

- a. Mendorong kembali kepada masyarakat pembudidaya ikan, khususnya pembudidaya ikan tambak untuk berusaha kembali budidaya ikan, dengan cara memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berusaha budidaya ikan kembali.
- b. Memberikan pelatihan secara bertahap tentang cara budidaya ikan yang baik dan benar.
- c. Untuk diperhatikan bahwasannya terlambatnya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya merupakan permasalahan klasik yang hampir tiap tahun, sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang dapat dilaksanakan dengan segera, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan cepat.

3) Cakupan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Sektor perikanan merupakan salah satu leading sektor dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun kontribusi sektor ini dirasakan belum optimal dikarenakan masih ada praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena terjadi kehilangan sumberdaya yang cukup besar akibat illegal fishing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa

kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk perairan laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan untuk pemerintah kabupaten kewenangan pengawasan terletak pada wilayah perairan umum. Capaian pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 telah tercapai sebanyak 4 lokasi atau 100% dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

4) Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup mudah didapatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengingat bahwa potensi laut yang cukup luas ditambah dengan sumber air tawar yang cukup banyak untuk pengembangan perikanan darat. Oleh karena itu ikan merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi ketersediaan.

Produk perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikonsumsi dalam bentuk olahan dan ikan segar. Teknik pengolahan ikan yang banyak dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengolahan lain, pengasapan/pemanggangan, penanganan segar, dan pembekuan.

Dari berbagai teknik pengolahan tersebut, penggaraman/pengeringan merupakan teknik pengolahan ikan yang banyak dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu 239,54% dari total produk olahan perikanan. Persentase produk perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan teknik pengolahannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.4. Persentase Produk Olahan Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Produk Olahan	Jumlah Hasil Olahan (Kg)	Persentase (%)
1.	Penggaraman/Pengeringan	624.780	65,90
2.	Pemindangan	1.723	0,2
3.	Pengolahan Lain	4.927	0,5
4.	Fermentasi	150.404	15,90
5.	Pelumatan Daging/ Surimi	166.293	17,50
	Total	948.127	100

Sumber : Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Capaian Produksi Pengolahan Hasil Perikanan pada tahun 2022 sebesar 948 Ton (Angka sementara) atau sebesar 41,74% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.271 Ton.

Capaian produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2022 ini masih jauh dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat, seperti :

1. Bahan baku pengolahan tidak pasti, karena disebabkan adanya rivilitasi alat tangkap dan harga pakan untuk budidaya sangat mahal
2. infrastruktur penunjang sistem rantai dingin seperti kulan ikan berpendingin, *cool box* untuk nelayan tradisional, pabrik es dan *cold storage* masih sangat minim.
3. Masih kurangnya mengadopsi teknologi pengolahan dan pengemasan, sehingga produk kita kalah bersaing dengan daerah lain.
4. keengganan bank menyalurkan kredit investasi ke industri di sektor perikanan lantaran tingginya tingkat kredit macet (*non performing loan NPL*)

3.5. Akuntabilitas Keuangan

3.5.1. Kinerja Anggaran Dinas Perikanan

A. APBD II dan DAK

Di tahun 2022 realisasi keuangan (Belanja Operasi) ditargetkan mencapai 95%, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi keuangan mencapai angka sebesar Rp. 11.538.848.862,00,- atau 94,99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.837.162.235,00- telah memenuhi angka target, capaian fisiknya mencapai 94% yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik".

Pagu anggaran ini dialokasikan untuk 2 (Dua) Jenis yang rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5. Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021

NO	BIDANG	PAGU (Rp)	PROPORSI	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.600.000	100,00	10.400.000	52,73
B.	BELANJA DAERAH	11.538.848.862,00	100,00	10.837.162.235	93,92
1.	Belanja Operasi	9.892.121.523,00	85,72	9.396.589.878	94,99
2.	Belanja Modal	1.646.727.339,00	14,28	1.440.572.357	87,03
	Jumlah	11.538.848.862,00	100,00	10.837.162.235	93,92

3.5.2. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan analisis keuangan terhadap kegiatan belanja langsung pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum keuangan dapat terserap dengan baik. Meskipun terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (*silpa*) tetapi hal tersebut lebih merupakan bentuk efisiensi anggaran dan tidak mempengaruhi capaian kinerja hasil (*outcome*). Secara rinci analisis pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Jumlah DPA		Perkembangan Pelaksanaan			Sisa Anggaran Rp.	
		Jumlah APBD Rp.	APBD Murni Rp.	Tambah Kurang APBD Rp.	Realisasi Keuangan Rp.	Fisik Real %		Bobot %
DINAS PERIKANAN								
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.450.000			43.020.000	98,6	0,0022	1.474.900
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.829.192.851			2.556.682.400	82,59	0,0003	492.510.452
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.840.000			146.498.000	100,00	0,0003	342.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.400.000	24.400.000	0	24.585.000	100,00	0,0017	53.800
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.284.250	1.007.582	0	1.007.582	100	0,0003	25.300
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	0	5.800.000	91,85	0,0012	2.200.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.297.572	9.297.572	0	8.315.000	100	0,0009	987.572
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	100	0,0006	0
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.934.880			479.607.768	99,95	0,05	327.082
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	0	8.600.000	95,55	0,0006	400.000
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000	49.200.000	0	26.742.435	54,35	0,0055	22.457.565
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.203.250	49.203.250	0	49.121.742	99,84	0,0055	81.508

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.346.680	8.346.680	0	8.333.445	100	100	0,0005	13.235
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.790.000			169.338.300	91,53	99,323	0,0111	1.451.700
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.528.274	13.930.000	4.020.000	17.510.000	97,55	100	0,0012	440.000
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.265.000	14.265.000	20.000.000	33.911.000	98,97	100	0,0023	354.000
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		2.316.986.386	534.399.006	1.782.587.380	2.313.155.487	99,83	100	0,15	3.830.899
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	100	100	0,0013	0
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.207.187.380	424.600.000	1.782.587.380	2.203.711.100	99,84	100	0,1473	3.476.280
3	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	54.249.503	54.249.503	0	54.044.900	99,62	100	0,0036	204.603
4	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	36.549.503	36.549.503	0	36.399.487	99,59	100	0,0024	150.016
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.248.539.671	426.089.671	822.450.000	1.204.727.665	96,49	89	0,08	43.812.006
1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	20.529.873	20.529.873	0	20.279.865	98,78	100	0,0014	250.008
2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40.173.798	40.173.798	0	15.000.000	37,34	42,779	0,0027	25.173.798
3	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.300.000	12.300.000	0	12.000.000	97,56	97,927	0,0008	300.000
4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.876.000	65.876.000	0	54.257.000	82,36	82,543	0,0044	11.619.000

5	Penjaminan Ketersediaan Sumber Pembiayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	920.600.000	218.150.000	702.450.000	918.191.800	99,74	100	0,0615	2.408.200
6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.060.000	24.060.000	0	20.681.500	85,96	100	0,0016	3.378.500
7	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perluangan Lahan untuk Pembiayaan Ikan di Darat	165.000.000	45.000.000	120.000.000	164.317.500	99,59	100	0,011	682.500
4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Daerah, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	64.909.905	64.909.905	0	64.866.905	99,93	100	0	43.000
5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	436.102.924	98.102.924	338.000.000	435.031.900	99,75	100	0,03	1.071.024
2	Peleaksanaan Bimbingan dan Penerangan Penyiaran atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	56.312.924	56.312.924	0	56.310.000	99,99	99,715	0,0038	2.924
3	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	367.690.000	29.690.000	338.000.000	366.621.900	99,71	100	0,0245	1.068.100
5 Program dan 29 Sub Kegiatan		7.822.714.811	4.745.650.289	3.077.064.522	7.515.401.776	95,88	97,60	0,22	307.313.035

BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2022 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dilihat dari capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, walau ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, hal ini disebabkan adanya faktor-faktor eksternal berupa terjadinya pandemi COVID-19, dimana ada refofusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Dan melemahnya pasar. Sedangkan untuk capaian keuangannya Dinas Perikanan tahun 2022 sebesar 95,88% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 97,07% atau kenaikan sebesar 1,19%, Walau demikian bukan berarti capaian fisik tidak baik, hal ini dikarenakan bentuk kefesiensian dalam penggunaan anggaran tahun 2022.

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dan mengacu pada target Perangkat Daerah, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2022 ada dua indikator yang kurang dari target, dan hanya satu yang memenuhi target. Kendala dan permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan tidak tercapainya target kedua indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
2. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Perikanan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dilihat dari capaian beberapa indikator kinerja, walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Capaian indikator kinerja Dinas Perikanan tahun 2022 juga didukung dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan yang cukup besar pada kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Perikanan dan Kelautan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKJIP sangat diharapkan sehingga LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

"Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti"

Kuala Tungkal, Januari 2023

